



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.1/5 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kerja sama yang bersifat wajib dan guna optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang selaras dengan program perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik Daerah melalui penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, telah dilakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik Daerah oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Program Dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Kerja Sama Daerah tanggal 18 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan kebutuhan prioritas Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Kerjasama Daerah.
- KETIGA : Dalam hal terdapat Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah diluar yang telah ditetapkan dalam diktum KESATU tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **3 Januari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
23. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah;
24. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/5 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Diisi dengan nama OPD yang mengusulkan/ berwenang	Pilih salah satu urusan pemerintahan yang paling tepat	Program yang akan dicantumkan dalam DPA (jika perlu)	Kegiatan yang akan dicantumkan dalam DPA (jika perlu)	Isi dengan bahasa yang ringkas dan mampu menunjukkan tujuan utama yang akan dicapai	Produk fisik/ kegiatan yang dihasilkan	Dampak yang ingin diciptakan	Pilih salah satu yang paling tepat	Dukungan anggaran/ kebijakan baik dari Pemda maupun calon Mitra.
1.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pendidikan	Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi	<p>a. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam negeri (program Pendidikan Magister dan Doktor Berbasis Prioritas Pembangunan Daerah, program kuliah kelas khusus Aparatur Sipil Negara (<i>Blended learning</i>));</p> <p>b. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi luar negeri</p>	<p>a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan Magister dan Doktor bertambah;</p> <p>b. Jumlah kerjasama dengan institusi pendidikan akan mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.</p> <p>c. Jumlah</p>	<p>a. Percepatan pencapaian prioritas pembangunan Daerah;</p> <p>b. Peningkatan daya saing Daerah;</p> <p>c. Inovasi kebijakan publik;</p> <p>d. Reformasi birokrasi yang lebih efektif;</p> <p>e. Digitalisasi pelayanan publik;</p> <p>f. Peningkatan integritas dan</p>	Sinergi	-

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>(Peningkatan kualitas melalui beasiswa luar negeri, program <i>Double Degree</i>); dan</p> <p>c. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah (Kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappena).</p>	<p>Program Studi Khusus ASN yang spesifik akan terbentuk yang relevan dengan kebutuhan Daerah.</p> <p>d. Peningkatan dana beasiswa LPDP;</p> <p>e. ASN mempunyai kompetensi unggul;</p> <p>f. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik;</p> <p>g. Adopsi Praktik Internasional (<i>Best Practices</i>) yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal Jawa Tengah;</p> <p>h. Peningkatan Daya Saing Daerah;</p> <p>i. Pengembangan kebijakan berbasisdata dan riset dari studi para ASN; dan</p> <p>j. Lahirnya</p>	<p>profesionalisme ASN;</p> <p>g. Peningkatan kualitas layanan publik;</p> <p>h. Sumber Daya Manusia ASN yang kompetitif;</p> <p>i. Budaya pembelajaran yang berkelanjutan; dan</p> <p>j. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.</p>		

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						inovasi program Daerah yang baru.			
2.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pendidikan	Kepegawaian Daerah	Pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian.	<p>a. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan (Program <i>Fast-Track</i> Rekrutmen ASN bekerja sama dengan universitas lokal maupun nasional untuk menjaring mahasiswa unggulan tahun terakhir di program studi yang relevan dengan kebutuhan Daerah, melalui program "Pendidikan Kedinasan";</p> <p>b. Kerja Sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian</p>	<p>a. Tersedianya ASN baru berkualitas;</p> <p>b. Terjaring ASN dengan kualifikasi unggul yang sesuai dengan kebutuhan Daerah;</p> <p>c. Sustainability Sumber Daya Manusia ASN; dan</p> <p>d. Terbangunnya sistem yang lebih terencana untuk mengantisipasi gelombang pensiun di masa depan.</p>	<p>a. Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan: kekosongan posisi akibat pensiun dapat diminimalisir, sehingga kinerja pemerintahan tetap optimal;</p> <p>b. Perbaiki Sistem Rekrutmen ASN: Adanya proyeksi dan perencanaan yang jelas mencegah ketidakseuaian jumlah ASN dengan kebutuhan Daerah.</p> <p>c. Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan Sumber Daya Manusia yang terencana dan berkualitas,</p>	Sinergi	-

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>Nasional (Penyusunan Proyeksi Sumber Daya Manusia Jangka Panjang; dan</p> <p>c. Bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional, menyusun proyeksi kebutuhan Sumber Daya Manusia ASN untuk 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan, berdasarkan Analisis Beban Kerja dan gelombang pensiun. Skema Rekrutmen Khusus Daerah: Mengusulkan skema khusus penerimaan ASN di Daerah yang memiliki kekhususan kebutuhan, dengan prioritas pada formasi</p>		<p>pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.</p>		

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					strategis.				
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Penanggulang-an bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiagaan Bencana..	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) pada tahun 2025 untuk 15 (lima belas) Destana di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota : a. Kabupaten Pekalongan; b. Kabupaten Batang; c. Kabupaten Purbalingga; d. Kabupaten Pemalang; e. Kabupaten Jepara; f. Kabupaten Kendal; g. Kabupaten Wonosobo; h. Kabupaten Banyumas; i. Kabupaten Tegal; dan j. Kabupaten Blora.	a. Mendorong masyarakat untuk menyadari potensi bencana yang ada di wilayah mereka serta memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi bencana; dan b. Membangun kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, termasuk kemampuan untuk merespons dan pulih setelah terjadinya bencana.	KSDD	Anggaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) untuk 15 (lima belas) Destana di 10 (sepuluh) Kabupaten di Jawa Tengah (termasuk cost sharing) Tahun 2025.



NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Energi dan sumber daya mineral.	Perekonomian pembangunan.	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup.	Pengembangan dan Pengelolaan Geopark Gunungsewu di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Terlaksananya kerjasama pengembangan Geopark Gunung Sewu oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tercapainya peningkatan perekonomian dan kunjungan wisata Geopark Gunung Sewu di Provinsi Jawa Tengah.	KSDD	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Perpustakaan	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.	Naskah Kuno	Menambah koleksi naskah kuno tentang Jawa Tengah.	Meningkatnya jumlah koleksi naskah kuno tentang Jawa Tengah.	KSDD	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Kearsipan	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.	Kerja sama teknis bidang kearsipan.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Kearsipan.	Perbantuan/ tukar menukar tenaga ahli/SDM bidang Kearsipan, pelatihan dan kegiatan magang/ praktek dalam bidang kearsipan.	KSDD	Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu).
7.	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Priwisata	Pemasaran pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.	Pengembangan Kepariwisata	Pengembangan pemasaran untuk 4 (empat) program : Industri, SDM dan Kelembagaan dengan 2 (dua) Provinsi yang menjadi segmen pasar Jawa	Peningkatan 2 s/d 5 % jumlah wisatawan, terselenggaranya 1kl benchmarking kepariwisataan pada masing-masing provinsi.	KSDD	Dukungan anggaran untuk pemasaran bersama (fam tour, keikutsertaan dan partisipasi program

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Tengah.			pemasaran, destinasi, SDM dan kelembagaan dari APBD masing-masing.
8.	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Pariwisata.	Administrasi urusan Perangkat Daerah.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	PKS Pengelolaan DTW Goa Seplawan.	Pendapatan Daerah untuk Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo.	Terpeliharanya aset Daerah, dan meningkatkan Pendapatan.	KSDD	-
9.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Program Pengembangan UMKM.	Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.	Pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.	Terjalinnnya kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat terkait pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.	a. peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha dan koperasi; b. Perluasan akses pemasaran produk; dan c. Peningkatan daya saing dengan inovasi produk.	KSDD	Provinsi Jawa Tengah. Anggaran Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran
10.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan,	a. Pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Tengah; dan b. Penggunaan fasilitas kampus UMKM shopee yang ada dengan beberapa fasilitas	Terfasilitasinya UMKM dalam pemasaran di market place shopee; menciptakan UMKM/industri baru yang unggul	UMKM memiliki toko digital yang dapat menjangkau seluruh Indonesia; peningkatan pengetahuan,	KSDPK	Anggaran Shopee dan APBD Provinsi Jawa Tengah

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	yang diberikan secara gratis yaitu ruang training, live streaming, foto produk ,pengemasan produk serta pendampingan UMKM secara berkala.	di Jawa Tengah.	keterampilan dan sikap pelaku usaha seperti meningkatkan akses pasar, daya saing, strategi bisnis yang efektif dan efisien serta peningkatan kualitas produk.		
11.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan UMKM secara online dan terpadu melalui kolaborasi dengan paltform link UMKM.	Pengelolaan Data UMKM yang tersentralisasi dan terorganisir.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM.	KSDPK	Anggaran dari BRI.

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pengelolaan dan pengembangan <i>co working space (hetero space)</i> di Semarang, Solo dan Banyumas.	Terjalinnnya kerjasama dengan perkumpulan imajinasi penaja mula dalam mengelola aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pengembangan fasilitas ruang kolaborasi, program pelatihan, serta jaringan yang mendukung pertumbuhan UMKM dan startup.	Peningkatan kapasitas bisnis, akses pasar dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM dan startup.	KSDPK	Anggaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Tengah dan Pihak Ketiga
13.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Kehutanan	Pengelolaan hutan.	Perbenihan tanaman hutan.	Pendampingan pembangunan sumber benih tanaman hutan.	Sumber benih yang memproduksi benih unggul yang bersertifikat. Berapa sumber benih? 0,5 ha	Pemuliaan pohon dan pengawetan keanekaragaman hayati dapat terlaksana	Sinergi	Anggaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) per sumber benih per tahun, untuk alokasi penanaman, pemeliharaan & pendampingan sampai umur produksi & sertifikasi

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									sumber benih.
14.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Lingkungan Hidup.	Pengelolaan persampahan	Penganganan sampah di TPA/TPST Regional.	Pengolahan sampah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang di TPST Regional Magelang.	200 (dua ratus) ton/ hari sampah dari Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dapat terolah	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah di Jateng, khususnya di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.	KSDD	Anggaran Rp10.000.000,00 (sepuluh) juta untuk pembahasan dengan TKKSD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
15.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Lingkungan Hidup.	Pengelolaan persampahan	Penanganan sampah di TPA/TPST Regional.	Penyediaan dan Pemanfaatan RDF dari TPST Regional Magelang.	70 (tujuh puluh) ton/hari RDF hasil pengolahan sampah dari TPST Regional Magelang terserap oleh industri semen sebagai bahan bakar alternatif pengganti batubara.	Berjalannya sirkular ekonomi dari pengolahan sampah di Jawa Tengah.	KSDPK	Anggaran Rp5.000.000,00 (lima juta) untuk pembahasan dengan TKKSD dan PT. Indocement.
16.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Lingkungan Hidup.	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Peningkatan dukungan terhadap Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) melalui KKN Tematik ProKlim dan Penelitian ProKlim.	5 (lima) Desa didampingi Perguruan Tinggi melalui Program KKN Tematik, Pengabdian atau Penelitian.	Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.	KSDD	Rp 20 juta untuk pembahasan konsep KKN Tematik, konsep naskah kerjasama dan pembekalan mahasiswa

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	a. Bintek penyelenggara sekolah SMA, SMK inklusi; dan b. Publikasi ilmiah, penerbitan Jurnal ilmiah SMA, SMK SLB.	Pengembangan dan penguatan bidang pendidikan melalui program konsultasi Kepala Sekolah dan guru, pelatihan dan pendidikan bagi Kepala Sekolah dan guru, publikasi karya ilmiah Kepala Sekolah dan guru, program magang mahasiswa, pengembangan media ajar, pengembangan pendidikan inklusi dan pengembangan, pelatihan dan tes kemampuan bahasa.	Berkembangnya bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan berkualitas di Jawa Tengah..	Sinergi	Anggaran Subsidi Silang diantara keduanya yaitu APBD Provinsi Jateng dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
18.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Pendidikan	Pengelolaan pendidikan.	Pengelolaan Pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terbangunnya USB di wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah.	Meratanya Pembangunan USB di Jawa Tengah.	KSDD	APBD Provinsi Jawa Tengah.
19.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan.	Pengelolaan Pendidikan SMA, Kejuruan, dan Dikus.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).	Terbangunnya USB di wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah.	Meratanya Pembangunan USB di Jawa Tengah.	KSDD	APBD Provinsi Jawa Tengah.
20.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SMA, SMK, dan Dikus.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).	Terbangunnya USB di wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah.	Meratanya Pembangunan USB di Jawa Tengah.	KSDD	APBD Provinsi Jawa Tengah.

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Pertanian	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan serta pakan kewenangan Provinsi.	Kerjasama Penelitian dan pengembangan IPTEK di sub sektor peternakan dan kesehatan hewan.	Perjanjian Kerja Sama.	Fasilitasi penelitaian, pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM.	KSDD	467 Juta
22.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Pengelolaan Sumber Daya Air.	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/ Kota.	Kebijakan Satu Data Jawa Tengah	SDM kompeten dalam bidang geospasial; produk DG/IG yang terstandarisasi dan dapat dibagi pakaikan serta berkelanjutan, geoportal yang di dayagunakan secara optimal.	Tersedianya data/ informasi geospasial yang memenuhi prinsip satu data guna perencanaan monitoring dan pengendalian pembangunan.	Sinergi	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
23.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/ Kota	a. Memanfaatkan tanah milik Provinsi Jawa Tengah untuk penyediaan sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Waduk Mulur kabupaten sukoharjo ; dan b. Meningkatkan nilai tambah produk UKM melalui	a. Menambah penghasilan daerah yang ditetapkan secara profesional melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian kerjasama; dan b. Mendukung	a. Mendukung pariwisata di kawasan Waduk Mulur melalui tersedianya sarana dan prasarana pariwisata; b. Bidang Pariwisata meningkatkan pelayanan masyarakat di kawasan	KSDD	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pelayanan masyarakat dalam bidang pariwisata di Kawasan Waduk Mulur Kabupaten Sukoharjo.	penyelenggaraan pariwisata di kawasan pariwisata waduk mulur melalui penyediaan sarana dan prasarana.	c. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan d. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pariwisata di Kawasan Pariwisata Waduk Mulur.		
24.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Sosial	Rehabilitasi Sosial.	Penanganan Gelandangan dan Pengemis antar Provinsi.	Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada PPKS dalam panti.	PPKS memiliki peningkatan kemampuan dan keberfungsian social.	PPKS menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat dengan baik.	Sinergi	-



NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Sosial	Rehabilitasi Sosial.	Penanganan Penyandang Disabilitas antar Provinsi.	Meningkatkan Pelayanan PPKS.	PPKS memiliki peningkatan kemampuan dan keberfungsian sosial.	Menurunnya jumlah PPKS.	KSDD	-
26.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal.	Sinergi pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Tersedianya bahan untuk perbaikan peningkatan kualitas pelayanan Publik.	Sinergi	-
27.	RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Pendidikan	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Kerjasama penyelenggaraan program dokter spesialis bagi dokter utusan khusus.	Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengembangan Prodi Progam Pendidikan Dokter Spesialis.	a. Peningkatan kualitas pelayanan dokter spesialis; dan b. Peningkatan pendapatan	KSDPK	Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
28.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Kelautan dan perikanan	Pengelolaan perikanan tangkap.	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.	Sistem Informasi Nelayan Terintegrasi Di Provinsi Jawa Tengah.	Tersedianya data/informasi nelayan di Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi.	Mempermudah dalam verifikasi nelayan calon penerima bantuan dan pengawasan penyaluran BBM Bersubsidi.	KSDPK	Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Anggaran dari Mitra).

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Kelautan dan perikanan	Pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil.	Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diluar minyak dan gas bumi.	Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Dokumen MOU / Perjanjian Kerjasama.	a. Efisiensi sumberdaya manusia dan finansial untuk pengelolaan WP3K; dan b. Tersedia data, kajian, penelitian terkait pemanfaatan WP3K termasuk biota dan ekosistemnya.	KSDPK	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Anggaran Dari Mitra)
30.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Kelautan dan perikanan.	Pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil.	Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diluar minyak dan gas bumi.	Pengelolaan kawasan konservasi dan pemanfaatan WP3K.	Dokumen MOU / Perjanjian Kerjasama.	a. Efisiensi sumberdaya manusia dan finansial untuk pengelolaan WP3K; b. Tersedia data, kajian, penelitian terkait pemanfaatan WP3K termasuk biota dan ekosistemnya; dan c. Tersedia CSR untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun pengelolaan kawasan	KSDPK	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Anggaran Dari Mitra)

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							konservasi.		
31.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Kelautan dan perikanan.	Pengelolaan perikanan tangkap.	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.	Monitoring, pemetaan dan pengolahan data garis pantai di kawasan Pelabuhan Perikanan melalui citra satelit.	Tersedianya data perubahan garis pantai di kawasan Pelabuhan Perikanan.	a. Data pendukung untuk penyusunan Rencana Pelabuhan Perikanan di masa mendatang; dan b. Mitigasi bencana di masa depan;	KSDPK	Anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) untuk penyediaan, pendampingan dan pelatihan. (Anggaran Dari Mitra)
32.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Kelautan dan perikanan.	Pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil.	Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diluar minyak dan gas bumi.	Monitoring, pemetaan dan pengolahan data hidro-oseanografi di perairan Pelabuhan Perikanan melalui pemasangan alat ukur pasang surut, ketinggian tanah, dan lain-lain.	a. Tersedianya data realtime hidro-oseanografi untuk perairan Pelabuhan Perikanan; dan b. Data permodelan hidrooseanografi perairan Pelabuhan Perikanan.	a. Data pendukung untuk penyusunan Rencana Pelabuhan Perikanan di masa mendatang (pembangunan dermaga, breakwater, sarana dan prasarana lainnya); dan b. Mitigasi bencana di masa depan.	KSDPK	Anggaran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pemasangan, penyediaan dan pendampingan dan pelatihan (Anggaran Dari Mitra)

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Pekerjaan umum dan penataan ruang.	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.	Pengelolaan dan pengembangan spam lintas kabupaten/ kota.	Nota Kesepakatan SPAM Regional Maslancip dan Randugunting.	Pembangunan SPAM Regional Maslancip dan Pembangunan SPAM Regional Randugunting.	Peningkatan akses air bersih.	KSDPK	Sudah teralokasi dana DPA DPU BMCK 2025 (untuk FS, DED dan Rapat Koordinasi).
34.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.	Sinergi fasilitasi penyediaan tempat dan tenaga advokad.	Terfasilitasinya konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum.	Meningkatkan pemahaman hukum bagi UMK, kegiatan UMK dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari masalah hukum.	Sinergi	DAK
35.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Kearsipan.	Pengelolaan Arsip.	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.	a. Penyelamatan dan pelestarian arsip KPU; b. Peningkatan SDM KPU; dan c. Tertatanya arsip-arsip hasil pemilu.	a. Terselamatkannya arsip-arsip KPU; b. Tertatanya arsip KPU; dan c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kearsipan.	Arsip-arsip KPU tertata dan terselamatkan, meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM bidang Kearsipan.	Sinergi	DAK

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Kearsipan.	Pengelolaan Arsip.	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.	Penyelamatan dan pelestarian arsip Bawaslu, Peningkatan SDM Bawaslu dan Tertatanya arsip hasil Pemilu.	Terselamatkannya arsip Bawaslu, Tertatanya arsip Bawaslu dan Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang kearsipan.	Arsip Bawaslu tertata dan terselamatkan, meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kearsipan.	Sinergi	DAK

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tttd**

NANA SUDJANA